

ABSTRAK

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Oleh

ANDRI EKA PRATAMA

Pembangunan pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar dengan tujuan memberikan pendidikan bagi warga negara untuk mengembangkan potensi diri. Dalam ruang lingkup pembangunan pendidikan harus adanya pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan Legislatif Daerah. Pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Utara terhadap Pembangunan Bidang Pendidikan, serta faktor kendala yang mempengaruhi kinerja pengawasan Komisi IV. Tipe penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian fungsi pengawasan yaitu, RPJMD Lampung Utara Tahun 2019-2024 sebagai standar pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, dan pelaksanaan pembangunan pendidikan di Lampung Utara berjalan sesuai tujuan yang telah disepakati bersama. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Lampung Utara sedang direalisasikan. Pembangunan secara fisik sudah mencapai 30% dalam tiga tahun yaitu 2018 hingga 2021. Serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pengajar meningkat, sehingga memperoleh berbagai penghargaan. Tindakan koreksi telah dilaksanakan guna menangani permasalahan yang ada dengan cepat dan tepat sehingga tidak meluas. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan pendidikan yaitu terkait dengan keterbatasan anggaran, serta masih terdapat oknum yang menggunakan anggaran pembangunan dengan tidak seharusnya dipergunakan.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan DPRD, Pembangunan Pendidikan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE SUPERVISION OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE BOARD (DPRD) OF LAMPUNG UTARA REGENCY IN EDUCATION DEVELOPMENT

By

ANDRI EKA PRATAMA

The development of education is in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 47 of 2008 concerning compulsory education with the aim of providing education for citizens to develop their potential. Within the scope of education development, there must be supervision by the Regional Government and the Regional Legislature. Article 41 of Law Number 32 of 2014 concerning Regional Government states that the DPRD has a legislative function, a supervisory function, and a budget function. This study aims to determine the implementation of supervision carried out by Commission IV of the DPRD of North Lampung Regency on the Development of the Education Sector, as well as the constraint factors that affect the supervisory performance of Commission IV. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the supervisory function research are the North Lampung RPJMD 2019-2024 as a standard for implementing the DPRD's supervisory function, and the implementation of education development in North Lampung is running according to mutually agreed goals. Educational development in North Lampung Regency is being realized. Physical development has reached 30% in three years, 2018 to 2021. And the quality of Human Resources (HR) for teaching staff has increased, thus earning various awards. Corrective actions have been implemented to deal with existing problems quickly and precisely so that they do not spread. Factors that become obstacles in the implementation of supervision of educational development are related to budget limitations, and there are still individuals who use development budgets that should not be used.

Keywords: *DPRD Supervision Function, Education Development.*